

Transformasi Digital Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Tentang *E-Budgeting*, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Almuhajir Haris¹

Insitut Teknologi Bisnis dan Administrasi Alagazali Barru¹

Email Korespondensi Author: almuhajirharis@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Kata kunci:

E-Budgeting;
Transparansi; Partisipasi
Masyarakat; Pengelolaan
Anggaran Desa;
Transformasi Digital.

Abstrak

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa melalui penerapan *e-budgeting* merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana *e-budgeting* berdampak dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Hasil menunjukkan bahwa *e-budgeting* memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, sekaligus meningkatkan akses informasi keuangan bagi warga setempat. Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan juga semakin diperkuat. Meski begitu, beberapa tantangan tetap ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana teknologi, serta penundaan dalam pelaporan keuangan. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penerapan *e-budgeting* di Desa Lempang telah memberikan perubahan positif, namun diperlukan terus-menerus peningkatan kualifikasi aparatur desa dan peningkatan infrastruktur digital agar tata kelola keuangan desa bisa lebih baik lagi.

Keywords:

E-Budgeting;
Transparency; *Community*
Participation; *Village*
Budget Management;
Digital Transformation.

Abstrack

Digital transformation in village financial management through the implementation of e-budgeting is a crucial step towards creating more transparent, accountable, and community-involved financial governance. This study aims to analyze the extent to which e-budgeting has increased transparency and community participation in Lempang Village, Tanete Riaja District, Barru Regency. The study used a qualitative approach, collecting data through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that e-budgeting facilitates the budget planning, implementation, and reporting processes, while also increasing access to financial information for local residents. Furthermore, the role of the Village Consultative Body (BPD) in oversight has been strengthened. However, several challenges remain, such as limited human resources, a lack of technological tools, and delays in financial reporting. The study concludes that the implementation of e-budgeting in Lempang Village has brought positive changes, but continuous improvement of village apparatus qualifications and digital infrastructure are needed to further improve village financial governance.

Pendahuluan

Dalam masa digitalisasi pemerintahan, transformasi digital menjadi prioritas utama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa. Salah satu inovasi yang muncul adalah penerapan sistem *e-budgeting* atau penganggaran berbasis elektronik, yang kini mulai dijalankan oleh beberapa desa di Indonesia, termasuk Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Pentingnya menerapkan *e-budgeting* dalam pengelolaan anggaran desa sangat tinggi, mengingat besarnya alokasi dana desa (ADD) yang diterima setiap tahun, serta kompleksitasnya dalam pengelolaan dana yang membutuhkan tingkat akuntabilitas dan transparansi tinggi (Suhartini, 2021).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan alat penting dalam mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sejak diperkenalkan oleh pemerintah pusat, desa-desa di seluruh Indonesia mendapatkan kewenangan lebih besar dalam mengelola keuangan dan merancang program pembangunan sesuai kebutuhan lokal (Rachmawati, 2020). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia,

sistem pengawasan yang masih lemah, serta risiko penyalahgunaan anggaran (Kurniawan, 2022). Berbagai kasus korupsi dana desa yang muncul dalam beberapa tahun terakhir menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan desa.

Dalam konteks ini, *e-budgeting* hadir sebagai solusi inovatif yang dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa. *E-budgeting* merupakan sistem penganggaran yang berbasis teknologi informasi, memungkinkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pelaporan keuangan desa dilakukan secara digital dan terintegrasi (Rahman & Sari, 2022). Sistem ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi risiko manipulasi data, serta memperluas akses informasi keuangan bagi warga desa. Dengan demikian, *e-budgeting* menjadi alat penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa penerapan *e-budgeting* di sektor publik, termasuk di tingkat pemerintah daerah dan desa, memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Penelitian oleh Prasetyo (2021) di beberapa desa di Jawa Tengah menunjukkan bahwa *e-budgeting* mampu mempercepat proses perencanaan dan pelaporan anggaran sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Hal yang sama juga ditemukan oleh Nurhidayat (2023), yang menyoroti bahwa *e-budgeting* memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan karena informasi keuangan bisa diakses secara real-time dan terdokumentasi dengan baik.

Selain aspek transparansi dan akuntabilitas, penerapan *e-budgeting* juga membantu meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan anggaran desa. Sistem ini memberikan kesempatan bagi warga untuk mengakses informasi keuangan, memberikan masukan, serta melaporkan dugaan kecurangan secara lebih sederhana dan cepat (Wulandari, 2022). Dengan demikian, *e-budgeting* tidak hanya memperkuat proses administratif, tetapi juga mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih partisipatif di tingkat desa. Namun, adopsi *e-budgeting* di tingkat desa tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, baik dalam pemahaman teknologi maupun administrasi aparatur desa (Fadilah, 2021). Infrastruktur teknologi yang belum merata, seperti akses internet dan perangkat komputer, juga menjadi kendala, terutama di desa-desa yang terpencil. Selain itu, budaya birokrasi yang masih tradisional dan resistensi terhadap perubahan juga memperlambat penerapan *e-budgeting* secara optimal (Sari & Nugroho, 2023).

Studi lapangan yang dilakukan di Desa Lembang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sangat relevan dalam konteks ini. Desa Lembang adalah salah satu desa yang telah menerapkan sistem *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran empiris mengenai implementasi *e-budgeting*, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini juga mengeksplorasi peran Badan Permusyawatannya (BPD) dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa berbasis *e-budgeting*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai integrasi *e-budgeting* dengan sistem informasi desa lainnya, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID), serta dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan anggaran desa. Selain itu, penelitian ini juga secara khusus mengkaji dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks digitalisasi pengelolaan anggaran, yang masih jarang dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan implementasi *e-budgeting* dalam pengelolaan anggaran desa di Desa Lembang; (2) Menganalisis efektivitas *e-budgeting* dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat; (3) Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penerapan *e-budgeting*; serta (4) Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pengelolaan anggaran desa berbasis digital. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan dapat diterapkan dalam pengembangan tata kelola keuangan desa di era digital.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada Kepala Desa, Bendahara Desa, Wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Lempang. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung dan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan *e-budgeting*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengetahui pola utama terkait efektivitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta hambatan dalam penerapan *e-budgeting*. Untuk memastikan keandalan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen pendukung. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai perubahan digital dalam pengelolaan anggaran desa di Desa Lempang.

Hasil dan Diskusi

Dalam menganalisis bagaimana sistem *e-budgeting* berdampak pada pengelolaan anggaran desa di Desa Lempang, penelitian ini melibatkan pengkajian beberapa indikator penting, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta hambatan dan tantangan yang muncul selama penerapannya. Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk memahami sejauh mana *e-budgeting* mampu meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara digital, memperkuat pengawasan dari dalam dan luar, serta membangun partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi keberhasilan teknis dalam mengimplementasikan *e-budgeting*, tetapi juga dampak sosial dan administratif yang timbul selama proses transformasi digital berlangsung. Selanjutnya, pembahasan akan menjelaskan hasil penelitian secara detail berdasarkan masing-masing indikator yang telah ditinjau.

Analisis Realisasi Anggaran Desa Lempang dalam Perspektif E-Budgeting

Analisis realisasi anggaran desa dari perspektif *e-budgeting* adalah penilaian terhadap pelaksanaan anggaran yang menggunakan sistem elektronik. Tujuannya adalah memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Sistem ini memudahkan proses pengelolaan anggaran, penyusunan laporan, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana secara langsung, cepat, dan terbuka. Hasil penelitian mengenai penerapan *e-budgeting* di Desa Lempang dapat dianalisis secara mendalam dengan pendekatan teori akuntabilitas publik, yang dianggap paling sesuai. Teori ini menekankan bahwa pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat secara terbuka, transparan, serta mendorong partisipasi warga dalam mengawasi pengelolaan dana (Oktavia & Handayani, 2019). Penerapan sistem *e-budgeting* di Desa Lempang membantu memudahkan proses tersebut dengan menyediakan data anggaran yang terintegrasi dan mudah diakses. Hal ini memudahkan proses pelaporan realisasi anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi dengan mengurangi metode manual yang rentan kesalahan, tetapi juga meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat melalui publikasi realisasi APBDes secara berkala melalui media seperti baliho dan kegiatan musyawarah desa.

Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan akses yang jelas dan rinci mengenai bagaimana dana desa digunakan untuk berbagai program pembangunan, sekaligus diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan mengawasi penggunaan dana tersebut. Ini sesuai dengan kriteria utama akuntabilitas publik yaitu akses informasi yang mudah dan penyajian laporan yang tepat waktu (Marantika, 2017). Transparansi dalam pengelolaan keuangan ini juga memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa berdampak positif terhadap penurunan risiko penyalahgunaan anggaran dan memperkuat hubungan harmonis antara warga dan aparatur desa. Selain itu, *e-budgeting* juga menjadi alat strategis yang mampu memperkuat akuntabilitas secara horizontal maupun vertikal, di mana pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta kepada pemerintah kecamatan dan daerah (Wahyuni et al., 2019). Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar efektivitas *e-budgeting* bisa lebih optimal (Fadilah, 2021). Pelatihan yang berkelanjutan, serta peningkatan infrastruktur, menjadi

kebutuhan mendesak untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, dengan menggunakan teori akuntabilitas publik sebagai kerangka analisis, penerapan *e-budgeting* di Desa Lempang bukan hanya kemajuan teknis, tetapi juga terobosan pada regulasi dan budaya tata kelola keuangan desa yang lebih baik serta lebih partisipatif.

Proses Realisasi Anggaran

Analisis pelaksanaan anggaran desa dari sudut pandang *e-budgeting* adalah pengecekan bagaimana anggaran dijalankan dengan sistem elektronik agar tercipta transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab. Sistem ini memudahkan proses pengelolaan anggaran, pengisian laporan, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa secara langsung dan terbuka. Hasil penelitian mengenai cara realisasi anggaran di Desa Lempang dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan uang pemerintah. Teori ini menjelaskan bahwa pengelolaan uang pemerintah harus dilakukan secara teratur, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan agar layanan publik tetap berkualitas dan masyarakat percaya terhadap pemerintahan setempat. Penerapan sistem *e-budgeting* yang terhubung dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Proses pencairan dana yang melalui beberapa tahap yang ketat, mulai dari pengajuan oleh pelaksana, verifikasi oleh sekretaris desa, hingga persetujuan Kepala Desa, menunjukkan adanya mekanisme pengendalian internal yang kuat dan terstruktur. Sistem digital ini memperkuat manajemen dokumen dan transaksi secara otomatis sehingga mengurangi risiko kehilangan data atau penyimpangan, serta meningkatkan keandalan dan akurasi informasi keuangan desa. Selain itu, teori *good governance* juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Melalui *e-budgeting*, realisasi anggaran dapat diawasi secara langsung dan audit dapat dilakukan kapan saja oleh berbagai pihak, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, pemerintahan tingkat kecamatan, dan daerah. Hal ini memperluas ruang pengawasan serta mendorong partisipasi warga dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan desa. Penggunaan sistem digital juga meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi keterlambatan dalam pelaporan yang sering terjadi pada sistem konvensional. Dengan data yang terpusat dan proses yang terorganisir, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penerapan *e-budgeting* di Desa Lempang merupakan langkah strategis dalam pengelolaan anggaran desa yang tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan sesuai dengan konsep *good governance*.

Transparansi dan Publikasi Realisasi Anggaran

Transparansi dan publikasi realisasi anggaran di Desa Lempang melalui *e-budgeting* membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai anggaran secara terbuka dan langsung. Sistem ini memungkinkan laporan penggunaan dana desa dipublikasikan melalui baliho dan pertemuan musyawarah desa, sehingga warga, termasuk yang tidak memiliki akses internet, bisa ikut mengawasi pengelolaan anggaran. Dengan peningkatan transparansi ini, risiko korupsi dan penyalahgunaan dana bisa dikurangi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa meningkat. Selain itu, pengumuman ini juga memperkuat peran warga dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran, yang mendukung tata kelola keuangan desa yang bisa dipertanggungjawabkan dan berintegritas. Hasil penelitian tentang transparansi dan publikasi realisasi anggaran di Desa Lempang dapat dianalisis menggunakan teori akuntabilitas publik sebagai pendekatan yang tepat. Teori ini menekankan pentingnya menjaga kebukaan informasi dan memberikan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat serta melibatkan berbagai pihak dalam mekanisme pengawasan. Pada wilayah Desa Lempang, transparansi ditunjukkan melalui papan pengumuman dan forum musyawarah desa.

Hal ini merupakan bentuk nyata penerapan prinsip transparansi, di mana informasi keuangan desa tersedia bagi seluruh masyarakat, termasuk yang kurang akrab atau memiliki akses terbatas terhadap teknologi. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha memenuhi hak warga untuk mengetahui penggunaan dana publik, yang merupakan salah satu dasar dari akuntabilitas publik.

Selain itu, pelaporan hasil penggunaan anggaran dilakukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat, pemerintah daerah, serta diintegrasikan ke dalam sistem *e-budgeting* yang terhubung hingga tingkat pusat. Ini memperkuat mekanisme pengawasan yang bersifat multi-tier dan menyeluruh. Dengan adanya integrasi data tersebut, pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran tidak hanya terbatas di tingkat desa, tetapi mencakup pemerintah kecamatan dan daerah, yang meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan dana desa dikelola secara tanggung jawab. Menurut teori akuntabilitas publik, informasi yang terbuka dan partisipasi berbagai pihak dalam pengawasan merupakan kunci keberhasilan tata kelola keuangan desa yang baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengawasan. Akhirnya, hal ini membantu membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Oleh karena itu, publikasi realisasi anggaran di Desa Lempang menjadi alat penting dalam mencapai akuntabilitas publik yang optimal. Berikut tabel ringkasan mengenai Realisasi Anggaran Desa Lempang sebagai berikut:

Tabel 1.

Ringkasan Realisasi Anggaran Desa Lempang s.d 31 Mei 2025

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
Pendapatan Transfer	2,173,003,300	1,045,530,020	1,127,473,280
- Dana Desa	845,088,000	496,745,000	348,343,000
- Bagi Hasil Pajak & Retribusi	88,094,500	52,856,700	35,237,800
- Alokasi Dana Desa	1,239,820,800	495,928,320	743,892,480
Total Belanja Pemerintahan Desa	1,182,843,832	423,456,117	759,387,715
- Siltap, Tunjangan, dan Jaminan Sosial	1,058,973,972	406,568,937	652,405,035
- Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, dll)	202,007,100	59,490,549	142,516,551
- Tunjangan BPD	119,400,000	49,750,000	69,650,000
- Operasional BPD	16,679,200	1,188,000	15,491,200
- Insentif/Operasional RT/RW	112,245,000	42,500,000	69,745,000
- Honorarium Pembantu Tugas Umum/Operator	118,800,000	49,500,000	69,300,000
- Jaminan Sosial (berbagai lembaga)	5,314,400	1,069,200	4,245,200
Total Pembangunan Desa	224,919,000	58,211,000	166,708,000
- Kesehatan (Posyandu, dll)	224,289,000	57,791,000	166,498,000
- Desa Siaga Kesehatan	17,064,000	4,866,000	12,198,000
Jumlah Pendapatan	2,173,003,300	1,045,530,020	1,127,473,280

Sumber: data oleh peneliti

Berdasarkan data realisasi anggaran Desa Lempang hingga 31 Mei 2025, terlihat bahwa pendapatan desa yang bersumber dari transfer pemerintah baru terealisasi sekitar 48% dari total anggaran, yaitu Rp1.045.530.020 dari target Rp2.173.003.300. Sementara itu, belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa juga masih rendah, dengan realisasi masing-masing sebesar 36% dan 26% dari anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran desa masih belum optimal di pertengahan tahun, sehingga diperlukan upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan agar target pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat tercapai sesuai rencana tahun anggaran 2025.

Kendala dalam Realisasi Anggaran

Kendala dalam realisasi anggaran adalah berbagai hambatan yang menyebabkan pelaksanaan penggunaan anggaran tidak berjalan sesuai rencana atau target. Umumnya, kendala ini meliputi perencanaan anggaran yang kurang matang, proses administrasi yang panjang dan rumit, keterlambatan pengajuan dan persetujuan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, hingga masalah teknis seperti gagal lelang dan hambatan infrastruktur. Kondisi tersebut mengakibatkan penyerapan anggaran yang lambat atau menumpuk di akhir tahun, sehingga mengganggu efektivitas pelaksanaan program dan tujuan pembangunan.

Hasil penelitian tentang hambatan dalam realisasi anggaran di Desa Lempang dapat dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang tepat untuk memahami tantangan dalam

menerapkan sistem baru, seperti e-budgeting, dalam konteks pemerintahan desa. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan dalam menerapkan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada sistem atau teknologi itu sendiri, tetapi juga pada berbagai faktor seperti prosedur administratif, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan dari institusi. Dalam kasus Desa Lempang, hambatan utama yang ditemukan adalah kompleksitas dari Prosedur Standar Operasional (SOP) yang terlalu rumit, serta beban administrasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dana desa meskipun sistem e-budgeting sudah diterapkan. Hal ini sesuai dengan fokus teori implementasi kebijakan, yaitu bahwa prosedur atau aturan yang rumit bisa memperlambat efektivitas pelaksanaan suatu program karena membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak.

Selain itu, keterbatasan kemampuan tenaga manusia dalam mengoperasikan *e-budgeting* serta kondisi sarana teknologi yang belum memadai, seperti gangguan jaringan internet, juga menjadi faktor lingkungan organisasi yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem tersebut. Teori ini menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan penerapan suatu kebijakan atau sistem baru. Upaya pemerintah desa dalam mengikuti pelatihan (Bimtek) serta berkoordinasi dengan dinas terkait dan penyedia aplikasi dapat dianggap sebagai bentuk adaptasi yang sesuai dengan prinsip teori implementasi kebijakan. Teori ini menekankan pentingnya pelatihan, penguatan kapasitas, serta kerja sama antarinstansi untuk mengatasi hambatan teknis maupun administratif. Dengan demikian, pendekatan berdasarkan teori implementasi kebijakan memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami hambatan serta solusi dalam penerapan e-budgeting di Desa Lempang. Hal ini berdampak positif pada peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan keuangan desa.

Dampak Realisasi Anggaran terhadap Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat

Realisasi anggaran memiliki peran penting dalam pengelolaan desa dengan meningkatkan penggunaan dana secara efektif serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memantau pembangunan desa. Hasil penelitian mengenai dampak pembuatan anggaran yang nyata terhadap pengelolaan tata kelola dan partisipasi masyarakat dapat dianalisis dengan menggunakan teori partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan (*public participation theory*) yang sangat sesuai dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Teori ini menekankan pentingnya masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pemerintahan dan pengawasan, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas kebijakan yang dibuat.

Dalam konteks Desa Lempang, penerapan anggaran yang transparan dan akuntabel memberi akses yang mudah bagi warga untuk memperoleh informasi terkait penggunaan dana desa. Informasi ini dapat diakses melalui media tradisional seperti baliho dan musyawarah desa, atau melalui komunikasi langsung dengan perangkat desa. Akses informasi yang terbuka merupakan dasar penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, di mana warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengawas dan mitra pemerintah desa. Keterlibatan aktif warga dalam pengawasan melalui pemberian saran, pengajuan pertanyaan, dan pelaporan dugaan penyimpangan membantu memperkuat mekanisme kontrol sosial yang efektif. Musyawarah desa berperan sebagai forum diskusi yang strategis untuk warga mengevaluasi hasil penggunaan anggaran desa serta memberikan masukan. Proses ini memperkuat tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat, karena pemerintah desa harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan penggunaan dana secara transparan dan tepat sasaran.

Selain itu, pendekatan teori partisipasi publik menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat secara nyata dalam evaluasi dan pengawasan keuangan desa membantu menemukan masalah lebih awal serta mendorong perbaikan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, partisipasi warga tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan anggaran yang transparan dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan tata kelola desa yang demokratis, responsif, dan berkelanjutan.

Peran BPD dalam Pengawasan Realisasi Anggaran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak sebagai perwakilan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana desa. BPD bertugas memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta memantau pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam forum musyawarah desa, BPD menyampaikan suara masyarakat dan mengidentifikasi adanya potensi penyimpangan. Peran pengawasan BPD sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan pembangunan desa yang berpartisipasi. Meski demikian, kinerja pengawasan BPD masih kurang optimal karena keterbatasan akses terhadap data serta kemampuan anggota BPD yang perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dapat dianalisis dengan menggunakan teori pengawasan sosial (*social oversight theory*). Teori ini menekankan pentingnya peran lembaga yang mewakili masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan penggunaan sumber daya publik tetap akuntabel. Dalam konteks Desa Lempang, BPD menjalankan fungsi pengawasan sosial dengan melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran desa dan menyampaikan hasilnya secara transparan dalam musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kunjungan lapangan secara berkala untuk memantau proyek pembangunan serta menerima langsung keluhan dan aspirasi warga merupakan bentuk pengawasan yang partisipatif dan menjaga hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan ini memperkuat fungsi kontrol sosial BPD dalam memastikan dana desa digunakan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata. Namun, teori pengawasan sosial juga mengakui keterbatasan yang dihadapi lembaga pengawas dalam melaksanakan pengawasan yang mendalam jika akses terhadap data teknis pengelolaan anggaran terbatas. Desa Lempang, misalnya, data teknis dikelola oleh tim khusus atau inspektorat desa, sehingga pengawasan BPD lebih bersifat makro dan administratif yang menghambat audit dan verifikasi data secara menyeluruh.

Hal ini berdampak pada penurunan efektivitas pengawasan untuk mendeteksi potensi penyimpangan lebih dini. Meski demikian, komitmen BPD dalam memantau informasi yang tersedia secara terbuka, seperti laporan keuangan dan realisasi anggaran yang dipasang di papan pengumuman, serta aktif melaporkan indikasi penyimpangan kepada pihak berwenang di tingkat kecamatan dan daerah, menunjukkan upaya maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Dengan demikian, pendekatan teori pengawasan sosial memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami peran penting BPD sebagai mitra pemerintah desa sekaligus perwakilan masyarakat dalam menjaga tata kelola keuangan desa agar tetap transparan, akuntabel, dan berintegritas, meskipun masih menghadapi tantangan akses informasi teknis yang perlu segera diatasi agar efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan.

Realisasi Anggaran dan Efektivitas Pembangunan Desa

Realisasi anggaran adalah cara pelaksanaan penggunaan dana desa sesuai dengan rencana yang tertuang dalam APBDes, yang menunjukkan seberapa besar dana sudah digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas pembangunan desa sangat berhubungan dengan tingkat realisasi anggaran, yang mengevaluasi sejauh mana hasil pembangunan tercapai secara optimal serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Dengan laporan realisasi anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah desa dapat menilai kinerja pengelolaan keuangan serta meningkatkan kepercayaan dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Hasil penelitian mengenai realisasi anggaran dan efektivitas pembangunan desa dapat dianalisis menggunakan teori pengawasan sosial, yang relevan dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa. Teori ini menekankan peran lembaga atau kelompok masyarakat yang mewakili, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan penggunaan dana publik, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dalam kasus Desa Lempang, BPD yang aktif dalam fungsi pengawasan meliputi evaluasi tahunan pelaksanaan anggaran dan melaporkan hasilnya secara terbuka dalam musyawarah desa, yang menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat. Kunjungan langsung BPD ke lapangan untuk memantau proyek pembangunan dan menerima aspirasi warga menunjukkan praktik pengawasan yang partisipatif, yang memperkuat hubungan antara BPD dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip teori pengawasan sosial yang menekankan keterlibatan

masyarakat dalam menjamin kualitas dan integritas pelaksanaan pembangunan. Namun, ada kendala berupa keterbatasan akses BPD terhadap data teknis pengelolaan keuangan yang dikelola oleh tim khusus atau inspektorat desa. Hal ini menyebabkan BPD hanya bisa melakukan pengawasan secara makro dan administratif, sehingga tidak bisa melakukan audit yang mendalam untuk memverifikasi data secara menyeluruh atau mendeteksi penyimpangan lebih awal. Teori pengawasan sosial menekankan bahwa keterbatasan akses informasi bisa menghambat efisiensi pengawasan, sehingga mengurangi mekanisme akuntabilitas. Meski demikian, BPD tetap berupaya menggunakan data yang tersedia di papan pengumuman dan aktif melaporkan ketidaksesuaian ke pemerintah kecamatan dan daerah, menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan.

Peran BPD sebagai mediator komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa juga sangat penting untuk memastikan suara warga didengar dan tindak lanjut dari pengawasan dilakukan. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, teori ini menekankan perlunya meningkatkan kapasitas BPD melalui pelatihan teknis, perluasan akses informasi, serta dukungan teknologi. Dengan demikian, penguatan peran BPD akan berkontribusi besar dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini pada akhirnya akan mendorong efektivitas pembangunan desa yang berkelanjutan dan memperhatikan partisipasi masyarakat.

Integrasi Realisasi Anggaran dengan Sistem Informasi Desa

Integrasi antara realisasi anggaran dengan sistem informasi desa adalah proses menggabungkan data keuangan desa dari sistem pengelolaan keuangan seperti Siskeudes dengan sistem informasi manajemen desa (SIMDes) atau aplikasi desa lainnya. Dengan adanya integrasi ini, proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan anggaran dapat dilakukan secara otomatis, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat dan perangkat desa dapat dengan mudah mengakses informasi anggaran secara real-time, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian mengenai integrasi realisasi anggaran dengan sistem informasi desa di Desa Lempang dapat dianalisis dengan menggunakan teori sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan (*e-governance theory*). Teori ini menekankan peran teknologi informasi sebagai alat strategis yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengintegrasikan *e-budgeting* ke dalam sistem informasi desa seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID), pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Akses data secara real-time memungkinkan pihak-pihak terkait, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun pemerintah daerah, melakukan pengawasan dengan lebih efektif dan cepat. Hal ini berdampak pada menurunnya risiko kesalahan administrasi serta potensi penyimpangan dana, sesuai dengan prinsip *good governance* yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, teori *e-governance* juga memberikan penekanan pada bagaimana integrasi teknologi informasi membantu pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat. Dengan tersedianya informasi yang mudah diakses dan akurat, kepala desa serta perangkat desa dapat merespons kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan secara lebih efektif. Di sisi lain, sistem ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa melalui akses informasi yang terbuka dan mudah dicapai, sehingga memperkuat fungsi kontrol sosial dan akuntabilitas publik.

Dari sisi administrasi, integrasi sistem informasi ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya serta waktu yang dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran desa. Dokumentasi yang terpusat dan digital juga memudahkan proses audit internal maupun eksternal, sehingga manajemen pemerintahan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penggunaan *e-budgeting* yang terintegrasi merupakan inovasi penting yang mendukung tata kelola keuangan desa yang baik, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kerangka teori *e-governance* dalam pemerintahan saat ini.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* di Desa Lempang secara nyata meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem *e-budgeting* memungkinkan seluruh tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran dilakukan secara digital dan terhubung dengan berbagai sistem informasi desa lainnya seperti Siskeudes dan SID. Dengan teknologi ini, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dipublikasikan secara terbuka melalui papan pengumuman dan forum musyawarah desa, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses, memahami, dan mengawasi penggunaan dana desa secara langsung. Dengan demikian, komunitas lebih aktif mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran, memperkuat keterlibatan sosial, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Meskipun *e-budgeting* memberikan manfaat yang signifikan, ada beberapa tantangan yang dihadapi, terutama terbatasnya keterampilan tenaga manusia dalam menggunakan teknologi dan ketidakmerataan akses internet. Selain itu, prosedur administrasi yang rumit memperlambat proses pelaporan dan pencairan dana. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah desa sudah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa serta koordinasi dengan pihak penyedia aplikasi dan instansi terkait. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi realisasi anggaran, meskipun masih terbatas dalam akses data teknis. Diperlukan peningkatan kapasitas BPD melalui pelatihan teknis serta akses informasi yang lebih luas agar fungsi pengawasan dapat lebih optimal. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan sumber daya manusia desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis berkala, pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan peran BPD dan masyarakat dalam pengawasan dana desa, integrasi *e-budgeting* dengan sistem informasi desa lainnya, serta penyederhanaan prosedur pelaporan agar proses administrasi lebih efisien. Dengan diimplementasikan, rekomendasi ini diharapkan dapat memaksimalkan peran *e-budgeting* sebagai alat pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Desa Lempang telah menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital seperti *e-budgeting* dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan layanan publik desa, yang mendukung pengembangan desa yang lebih efektif dan partisipatif.

Referensi

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fadilah, N. (2021). Tantangan implementasi e-budgeting di pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 77-89.
- Kelompok 3. (2025). *Laporan studi lapang di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*. Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru.
- Kurniawan, D. (2022). Pengelolaan dana desa dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara*, 10(1), 45-60.
- Nurhidayat, A. (2023). Peran e-budgeting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 8(1), 112-125.
- Prasetyo, E. (2021). E-budgeting dan transparansi pengelolaan anggaran desa. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 19(3), 201-215.
- Rahman, A., & Sari, R. (2022). Sistem e-budgeting dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 13(4), 233-245.

- Rachmawati, Y. (2020). Dana desa dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Desa*, 7(2), 99-110.
- Sari, D., & Nugroho, B. (2023). Digitalisasi tata kelola desa: Peluang dan tantangan. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 11(1), 50-66.
- Suhartini, T. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di era digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(2), 145-158.
- Wulandari, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa berbasis digital. *Jurnal Partisipasi Publik*, 14(3), 178-192.
- Nurjamiyah. (2020). Aplikasi pengelolaan keuangan melalui e-village budgeting sebagai sarana transparansi pengelolaan keuangan. *Journal of Information System Research*, 1(2), 77-81.
- Mutamimmah, et al. (2018). Penggunaan aplikasi e-village budgeting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa di Banyuwangi. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa*, 5(1), 105-115.
- Ramadhany, R. K. (2018). Inovasi tata kelola keuangan pemerintah desa: Electronic village budgeting untuk menciptakan good governance. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 7(2), 95-106.
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan e-budgeting dalam pemerintahan daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-683.
- Pratiwi, R. N. (2016). Manajemen keuangan desa melalui inovasi electronic village budgeting. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 4(1), 20-30.
- Setyawan, S., et al. (2016). Analisis efektivitas sistem e-village budgeting dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 45-55.
- Sari, R., & Rahman, A. (2022). Sistem pengawasan dan monitoring anggaran desa berbasis elektronik. *Jurnal Pengawasan Publik*, 9(2), 120-130.